

Wali Kota Depok Diminta Batalkan Alih Fungsi Lahan SDN Pondok Cina 1

DEPOK (IM) - Orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 mendesak Pemerintah Kota Depok membatalkan alih fungsi lahan sekolah menjadi masjid di Jalan Margonda Raya.

Kuasa hukum orang tua SDN Pondok Cina 1, Francine Widjojo mengatakan telah melayangkan keberatan administratif kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris atas rencana pembangunan masjid tersebut.

"Kami menyampaikan nota keberatan atas tindakan pengurusan dan pemusnahan SDN Pondok Cina 1 oleh Wali Kota Depok beserta jajaran secara sewenang-wenang," kata Francine di Balai Kota Depok, Senin (9/1).

Dalam nota keberatan itu, Francine menyampaikan ada 5 poin yang dituntut oleh orang tua siswa kepada Pemerintah Kota Depok di antaranya mencabut dan membatalkan persetujuan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid yang tidak sesuai peruntukannya.

"Wali Kota Depok untuk meninjau ulang rencana pemusnahan bangunan, relokasi, dan merger/regrouping SDN Pondok Cina 1 dengan melibatkan partisipasi

penuh pengajar, peserta didik, dan orang tua murid serta memprioritaskan jaminan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang layak," kata Francine.

Orang tua siswa juga meminta Wali Kota Depok beserta jajaran Pemerintah Kota Depok selama proses penundaan pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada sekolah itu untuk tidak melakukan segala upaya intimidasi atau ancaman pengurusan SDN Pondok Cina 1.

"Selanjutnya, Wali Kota Depok untuk menjamin kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 berjalan kembali seperti keadaan semula seperti sebelum adanya upaya pemusnahan aset bangunan," kata Francine.

Terakhir, Wali Kota Depok, Mohammad Idris juga diminta untuk memberikan pemulihan psikologis beserta pemulihan hak bagi anak-anak selaku peserta didik pada SDN Pondok Cina 1 yang terlanggar. "Kami sudah antarkan surat tersebut dan sudah diterima oleh pihak Pemerintah Kota Depok kami menunggu 10 hari kerja untuk mereka menanggapi," kata Francine. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



CAPAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS KPK
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatarongan Panggabean (tengah) bersama Anggota Dewas KPK Albertina Ho (kiri) dan Harjono (kanan) menyampaikan Laporan Kinerja Dewas 2022, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (9/1). Sepanjang 2022 Dewas KPK menerima 477 nota dinas, terdiri dari 282 dari internal dan 195 dari eksternal, dimana 76 terkait pelanggaran kode etik diantaranya soal pelanggaran yang dilakukan Ketua KPK Firlil Bahuri dan mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan sejumlah pegawai termasuk soal kasus perselingkuhan.

Pemprov DKI akan Terapkan Jalan Berbayar untuk Atasi Kemacetan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih menunggu proses lanjutan rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI terlebih dulu. Berikutnya, baru beberapa proses lainnya dibawa untuk disetujui di rapat paripurna.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berencana menerapkan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik (JBE). Aturan itu akan diterapkan di sejumlah ruas protokol Jakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.

Namun demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih menunggu proses lanjutan rapat kerja

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI terlebih dulu. Berikutnya, baru beberapa proses lainnya dibawa untuk disetujui di rapat paripurna.

Berdasarkan draft tersebut, kendaraan bermotor akan dibatasi secara elektronik dengan berbayar di ruas jalan dan waktu tertentu. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menjelaskan, dalam draft yang dibuat pada Oktober 2022, aturan itu dirancang berdasarkan banyak aspek seperti kemacetan dan

kecelakaan lalu lintas hingga konsumsi bensin yang masif.

Menurut raperda yang dibuat, setidaknya ada beberapa fase implementasi sistem pembayaran. Namun demikian, soal mendetail penyelenggaraan raperda ke depannya, akan berfokus pada lima poin.

Pertama, kriteria kawasan dengan jumlah lajur dan kecepatan rerata kurang dari 30 kilometer (km) per jam, selain dari ketersediaan jaringan angkutan yang memadai. Kawasan PL2SE nantinya dilaksanakan di 25 ruas jalan berbeda dengan implementasi bertahap.

Ketiga, penyelenggaraan jalan berbayar nantinya dilakukan setiap hari pada pukul 05.00-22.00 WIB. Khusus untuk jenis kendaraan, diwajibkan pada kendaraan bermotor dengan perlengkapan fasilitas perangkat identitas kendaraan elektronik, dan atau perangkat elektronik lainnya.

"Terakhir, penyelenggara PL2SE dapat bekerja sama dengan penyedia jasa," kata Kepala Dishub DKI, Syafrin Li-

puto dalam rapat kerja dengan DPRD DKI di Jakarta pada akhir tahun lalu.

Meski belum pasti kapan diberlakukan, Dishub DKI telah menyusun daftar jalan yang akan diberlakukan kebijakan ERP. Di antaranya, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamaraja,

Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, dan Jalan Suryopranoto.

Kemudian, Jalan Kyai Caringin, Jalan Balikpapan, Jalan S Parman, Jalan Tomang Raya, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan, Jalan Jenderal A Yani, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Pasar Senen, Jalan Gunung Sahari, dan Jalan Rasuna Said. ● yan

SERING DIBUAT MAIN GAME

Warga Setuju Pemprov DKI Kurangi Titik JakWifi

JAKARTA (IM) - Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi titik jaringan internet (wifi) gratis di Ibu Kota disambut baik oleh sejumlah warga. Pengurangan wifi gratis yang programnya dinamai Jakwifit itu salah satunya dilakukan di Jalan Wijaya, Gang Langgar, Kampung Sawah, Blok Q, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Warga setempat bernama Hermanto mengatakan, pengurangan titik Jakwifit adalah langkah baik agar fasilitas itu tidak disalahgunakan. "Setuju aja kalau dikurangi. Untuk di sini aja itu soalnya sering dibuat main game bukan buat belajar," ujar Hermanto saat ditemui, Senin (9/1).

Hermanto mengatakan, sejumlah orang yang memanfaatkan keberadaan wifi itu umumnya anak-anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia menyebut, pemasangan Jakwifit di wilayahnya dilakukan sejak beberapa bulan lalu, dengan tujuan menunjang proses belajar mengajar anak-anak di sekitar Petogogan. Namun, wifi itu justru kerap digunakan anak-anak dan remaja untuk bermain game online.

"Biasanya itu anak-anak. Paling mungkin kelas 1 SMP," ucap Hermanto.

Hermanto mengaku kerap menyaksikan langsung saat anak-anak memanfaatkan wifi gratis untuk kegiatan bermain game hingga menonton video. Menurut dia, anak-anak kerap berkumpul di titik wifi itu pada sore hingga malam hari.

"Itu biasanya sore, magrib sampai malam. Itu anak-anak pada kumpul lalu main game mobile legend," ucap Hermanto.

Program internet gratis JakWifi diluncurkan oleh Pemprov DKI pada 2020 lalu, untuk membantu anak-anak yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun pada tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi titik wifi gratis di Ibu Kota dari 3.500 titik menjadi 1.263 titik pada tahun ini.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) DKI, Raides Aryanto mengatakan hal itu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat setelah pandemi Covid-19. "Karena pengurangan anggaran, jadi kuantitas berkurang," kata Raides. ● yan



FOTO: ANT

PELATIHAN MEMBATIK MOTIF BETAWI DI JAKARTA

Sejumlah warga mengikuti pelatihan membatik motif Betawi di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (9/1). Kegiatan yang digelar oleh ESC bekerja sama dengan batik Betawi Tambora itu untuk menyosialisasikan batik dari Jakarta dan mengembangkan industri kreatif UMKM kepada masyarakat.

Pengurusan Bangunan di Bantaran Kali Ciliwung Jalan Terus

JAKARTA (IM) - Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Jakarta Timur melayangkan surat peringatan kedua perihal pengurusan bangunan di bantaran Kali Ciliwung di Jalan IPN Kebon Nanas RT 09 RW 06, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara.

Kasatpol PP Jakarta Timur, Budhy Novian mengatakan, penertiban bangunan itu dilakukan karena berdiri di dekat proyek Outlet Sodedan Kali Ciliwung.

"Kita sudah jelaskan bahwa hari ini tidak ada penertiban, hanya melaksanakan prosedur penyampaian SP2," kata Budhy Novian di Jakarta, Senin (9/1).

Budhy menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun pihak Kecamatan Jatinegara terdapat sebanyak 50 kontrakan dan sembilan kios di area tersebut. Dia mengatakan, pihaknya dibantu jajaran Polres Metro Jakarta Timur dan Dandim 0505/JT dalam penyampaian surat peringatan (SP) kedua penertiban bangunan di bantaran Kali Ciliwung tersebut.

Budhy mengatakan, beberapa warga penghuni bantaran Kali Ciliwung mengaku memiliki bukti surat kepemilikan tanah. Pihaknya pun bersama Kecamatan Jatinegara melakukan pendataan. "Hari ini sedang didata kembali," ujar Budhy yang menambahkan terkait penertiban bangunan di Kali Ciliwung tersebut masih harus menunggu kesiapan baik teknis maupun administrasi.

Pihaknya juga masih harus melayangkan surat peringatan ketiga kepada penghuni bangunan tersebut untuk segera mengosongkan sebelum diterbitkan. "Jika sudah siap kita layangkan SP3 sebagai prosedur peringatan terakhir sebelum dilakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutur Budhy.

Terus Berjalan
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dudi Gardesi menjelaskan proyek normalisasi Kali Cili-

wung masih terus berjalan. Dudi mengatakan tidak benar jika proyek tersebut mandek.

"Nggak, nggak mandek. Kita jalan terus. Cuma saya bilang, ada beberapa permasalahan kan. Nah permasalahan itu disebut 'mandek', kata Dudi, di kantor Dinas SDA DKI Jakarta, akhir tahun lalu.

Dudi lantas mencontohkan permasalahan yang dihadapi dalam proyek normalisasi Ciliwung, terutama dalam hal status lahan. Misalnya ada perebutan waris di tanah tersebut. "Ada juga yang tadi saya bilang, nggak ada *land title* nya. Dia tidak punya alas haknya tapi dia menempati gitu. Ya bukan mandeklah, kita berproses," jelasnya.

Menurutnya, penyelesaian permasalahan tersebut sangatlah penting. Karena jika tidak maka pekerjaan konstruksi tidak bisa berjalan. "Kita mau-nya kalau ini udah dibebaskan oleh kita, ya KemenPUPR bisa melaksanakan proyek konstruksinya juga lebih mudah," ujarnya.

Kemudian saat ditanya mengenai pembebasan lahan di Rawajati, Dudi mengaku hingga kini pihaknya masih berproses. Diketahui, lahan di Kelurahan Rawajati menjadi satu dari empat yang diprioritaskan. ● yan

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILIHAN PT BINTANG SATU CIPTA
Pengumuman ringkasan rancangan pengambilan ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
PT BINTANG SATU CIPTA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa:
Tuan MA'RUF SAMUDRA akan mengalihkan 50% (enam puluh persen) saham kepada Nona FAHDIRA TETA LUBIS melalui pembelian dan pengalihan saham langsung dari pemegang saham.
Segala permintaan informasi dan/atau keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk para kreditor (jika ada) terhadap rancangan pengambilalihan ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini ke alamat sebagai berikut:
PT BINTANG SATU CIPTA
Menara Hijau Lantai 7 Suite 702,
Jalan MT Haryono Kavling 33,
RT 002 RW 003
Jakarta, 10 Januari 2023
Direksi PT BINTANG SATU CIPTA

10 Calon Sekda DKI Siap Ikut Tes Lanjutan

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan ada 10 nama calon sekretaris daerah (Sekda) DKI yang sudah melalui tahap kompetensi bidang pada Rabu (4/1). Menurut Kepala Bidang Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Eti Cahyaningsih, ke-10 calon itu akan mengikuti tes lanjutan.

"Di tes kompetensi manajerial melalui assessment oleh BKN dan wawancara dengan tim panitia seleksi," kata Eti kepada awak media di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, setelah tes dilakukan, akan diterangkan sistem gugur dan dipilih orang

yang memenuhi pencapaian standar penilaian untuk melanjutkan proses. Sehingga, tidak diambil berapa orang yang menjadi calon ke depannya. "Asalkan memenuhi standar penilaian, maka akan lanjut ke tahap berikutnya," ucap Eti.

Kendati demikian, pihaknya tidak mengetahui sejauh mana hasil tes sebelumnya berjalan. Hasil tes kompetensi bidang, dia sebut, akan diumumkan pada Senin.

Merujuk pada jadwal yang ditetapkan, tes kompetensi manajerial akan dilakukan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 16 Januari 2023. Sementara untuk tes wawancara, masih menunggu hasil

dari tes di BKN itu.

"Target nama sekda muncul sekitar awal Februari ya, karena prosesnya sampai ke presiden. Jadi memang agak lama," tutur Eti.

Untuk tahap akhir, sambung dia, tiga nama bakal diserahkan ke Presiden Jokowi. Pemilihan tiga nama itu akan dilakukan, walaupun, keseluruhan nama yang ada dinyatakan lulus. "Akan ditentukan tiga kandidat terbaiknya oleh tim pansel," jelas Eti.

Posisi sekda DKI saat ini kosong. Hal itu setelah Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono mengeser Marullah Matali dari sekda menjadi deputi gubernur. ● yan



FOTO: ANT

REVITALISASI HALTE TRANSJAKARTA KAMPUNG MELAYU

Warga melintas di depan Halte TransJakarta Kampung Melayu yang ditutup untuk direvitalisasi, di Jakarta, Senin (9/1). PT TransJakarta menutup sementara Halte TransJakarta Kampung Melayu untuk proses konstruksi revitalisasi halte dan menargetkan pada akhir 2023 ada 72 halte yang telah direvitalisasi dari kurang lebih 200 halte.

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ISTANA NURIS SEDAYU, tanggal 10 Januari 2023 No. 05, dibuat di hadapan Mohammad Toiyib, SH, Mkn, Notaris di Kabupaten Bekasi, bahwa PT. ISTANA NURIS SEDAYU, berkedudukan di Kabupaten Tangerang tersebut telah dibubarkan. Kepada para kreditor dan debitur diminta mengadakan perhitungan kepada Direksi selaku likuidator perseroan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak perseroan dibubarkan
Jakarta, 10 Januari 2023
PT. ISTANA NURIS SEDAYU
Dalam Likuidasi

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. WAHYU MITRA PERKASA, tanggal 11 November 2022 No. 10, dibuat di hadapan Mohammad Toiyib, SH, Mkn, Notaris di Kabupaten Bekasi, bahwa PT. WAHYU MITRA PERKASA, berkedudukan di Jakarta Timur tersebut telah dibubarkan. Kepada para kreditor dan debitur diminta mengadakan perhitungan kepada Direksi selaku likuidator perseroan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak perseroan dibubarkan
Jakarta, 11 November 2022
PT. WAHYU MITRA PERKASA
Dalam Likuidasi

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PUTRA RODA CEMERLANG, tanggal 10 Januari 2023 No.04, dibuat di hadapan Mohammad Toiyib, SH, Mkn, Notaris di Kabupaten Bekasi, bahwa PT. PUTRA RODA CEMERLANG, berkedudukan di Jakarta Selatan tersebut telah dibubarkan. Kepada para kreditor dan debitur diminta mengadakan perhitungan kepada Direksi selaku likuidator perseroan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak perseroan dibubarkan
Jakarta, 10 Januari 2023
PT. PUTRA RODA CEMERLANG
Dalam Likuidasi

BERTEMU PAGUYUBAN DELMAN

Pemkot Jakpus: Jaga Kebersihan Monas dari Kotoran Kuda

JAKARTA (IM) - Pemkot Jakarta Pusat meminta kusir delman untuk menjaga kebersihan Kawasan Monas atau di Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat dari kotoran kuda. Hal itu ditekankan dalam dialog pemerintah bersama paguyuban kusir delman, Senin (9/1).

Pt Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin mengatakan, selain menjaga kebersihan terkait keberadaan delman perlu juga diperhatikan perihal kesehatan kuda dan kelaikan gerobak atau delman pengangkut wisatawan.

"Si kudanya di Monas harus memenuhi ketentuan yang berlaku tentu diatur dengan adanya surat keterangan sehat hewan maupun dalam bentuk lainnya yang bisa diperlihatkan kepada masyarakat. Kusir sama kudanya harus sehat," kata Iqbal.

"Delman atau gerobaknya juga harus memenuhi ketentuan keselamatan pengemudi, baik itu dari spesifikasi kendaraan, gerobak dan lain-lain. Ada UKPD terkait yang berwenang untuk memastikan bahwa delman laik fungsi dinaiki oleh masyarakat," tambahnya.

Iqbal menegaskan kegiatan ini bukan pelarangan pengoperasian delman di kawasan Monas melainkan se-

buah pengaturan. Delman dapat beroperasi Sabtu-Minggu dan hari libur untuk melayani wisatawan lokal maupun mancanegara nantinya. Menurutnya, di ruas Jalan Medan Merdeka, Sudirman-Thamrin ada beberapa pengaturan yang melekat di sepanjang jalur tersebut terkait dengan pemanfaatan fasilitas jalan dan umum lainnya seperti pengaturan ganjal-genap untuk kendaraan roda empat.

Kemudian penyeberangan jalan khusus untuk pejalan kaki serta jalur khusus untuk sepeda, sehingga delman pun perlu dilakukan pengaturan.

"Delman diatur di sepanjang Monas, Medan Merdeka pada Sabtu dan Minggu," ungkapnya.

"Ini untuk menunjang lokasi Monas sebagai tujuan wisata baik penduduk Jakarta atau pun luar. Dan itu kami berikan kesempatan warga Jakarta memanfaatkan delman pada hari Sabtu dan Minggu, dan hari libur," lanjutnya.

Sebelumnya, larangan beroperasi delman membuat sejumlah kusir mengeluh terancam kehilangan penghasilan. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan bahwa delman masih dapat beroperasi pada Sabtu dan Minggu. ● yan